

Selasa, 13 Juli 2021

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	AAJI: Bisnis Masih Menantang, Unit-Linked Terus Berkembang pada 2021
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Kinerja Produk Unitlink
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20210712/215/1416786/aaji-bisnis-masih-menantang-unit-linked-terus-berkembang-pada-2021
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Positif

Home • Finansial • Asuransi

AAJI: Bisnis Masih Menantang, Unit-Linked Terus Berkembang pada 2021

Premi asuransi unit-linked tumbuh pesat pada kuartal I/2021. Produk itu bertahan sebagai portfolio utama industri asuransi jiwa

Wito Pangestu Pratomo • Bisnis.com
12 Juli 2021 • 10:40 WIB



Kawasan konferensi dalam tiga ruangan bertingkat Asosiasi di Hotel Asuransi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta. Selasa (15/10/2020). Rano - Rano Rikard

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai bahwa 2021 masih menyimpan tantangan yang besar bagi bisnis proteksi. Peta industri pun perlu comat mencari celah pengembangan bisnis dan menjaga kualitas layanan, termasuk dalam unit-linked sebagai produk utama.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Temubudon menyatakan bahwa ketidakpastian masih cukup tinggi dalam lima bulan tahun ini. Hal tersebut karena penyebaran Covid-19 yang terus terjadi dan sejumlah negara sedang berjuang menghadapi gelombang kedua pandemi, seiring adanya mutasi varian virus delta.

Menurutnya, 2021 masih menjadi tahun yang penuh tantangan bagi bisnis asuransi jiwa. Meskipun begitu, tetap terdapat potensi pertumbuhan bagi industri asuransi jiwa, termasuk produk asuransi yang diikat dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked yang merupakan portfolio utama industri.

"Tahun ini ruang pertumbuhan terbuka, tapi tidak bisa menjalankan bisnis atau mencari celah pemasaran seperti tahun sebelumnya," ujar Budi pada Senin (12/7/2021).

Dia menilai bahwa produk unit-linked cukup memengaruhi kinerja industri, hal tersebut karena produk itu mencapai hampir tiga per empat portfolio industri. Dalam kondisi pasar modal yang tertekan seperti saat awal pandemi Covid-19, sebagian pemegang polis melakukan penarikan dana atau mengalihkan polisnya, meskipun sebagian lainnya justru menambah komponen investasi.

Menurut Budi, kondisi psikologis pemegang polis sedikit banyak turut berkaitan dengan bagaimana cara agan dalam mempromosikan produk unit-linked kepada calon pemegang polis. Oleh karena itu, saat ini perusahaan-perusahaan asuransi jiwa perlu memfasilitasi kualitas pemasaran yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah.

Baca Juga : OJK: 6 Perusahaan Sudah Ditetapkan Jual Asuransi Unit-Linked Digital, 4 Masih Diproses

Selanjutnya, perusahaan asuransi pun harus memastikan pemenuhan komitmen kepada pemegang polis, yakni saat terdapat pengajuan klaim. AAJI akan terus mengimbau anggotanya untuk selalu mematuhi apa yang dijanjikan kepada para pemegang polis.



Menurutnya, kepercayaan pemegang polis menjadi kunci dalam pengembangan bisnis asuransi jiwa, terlebih dalam kondisi krisis seperti saat ini. Budi meyakini bahwa asuransi dan seluruh anggotanya mampu meningkatkan kepercayaan itu sehingga perusahaan asuransi dapat bertahan.

"Kalau melihat hasil kinerja kuartal I/2021, meskipun terdapat beberapa prosesi yang tertah dari media sosial dan media online, ternyata data menunjukkan masyarakat yang membutuhkan proteksi asuransi jiwa, pilihan terbesarnya tetap unit-linked," ujarnya.

Baca Juga : Prudential Luncurkan PRUCekatan, Sistem Pemasaran Digital Unitlinked

Pernyataan Budi itu muncul kepada data AAJI, yakni pada kuartal I/2021 total premi unit-linked mencapai Rp26,6 triliun atau tumbuh 31,7 persen year-on-year (yoy) dari sebelumnya Rp27,2 triliun. Nilai premi dan angka pertumbuhannya itu lebih besar dibandingkan produk tradisional, yang pada kuartal I/2021 mencapai Rp21,6 triliun atau tumbuh 23,4 persen (yoy) dari Rp17,5 triliun.

Judul	Ini Empat Kriteria Nasabah yang Cocok Memilih Unit-Linked Versi AAJI
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Edukasi Calon Nasabah Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20210712/215/1416666/ini-empat-kriteria-nasabah-yang-cocok-memilih-unit-linked-versi-aaji
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Positif

Home • Finansial • Asuransi

Ini Empat Kriteria Nasabah yang Cocok Memilih Unit-Linked Versi AAJI

AAJI menjabarkan bahwa *unit-linked* merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan sekaligus investasi. Terdapat manfaat ganda yang akan diperoleh pemegang polis *unit-linked*, yakni proteksi asuransi dan pengembangan dana melalui investasi.

Wati Pangestu Pratama - Bisnis.com
12 Jul 2021 | 11:06 WIB



Unit-Linked. Berdasarkan data Departemen Perlindungan Konsumen OJK, penjualan produk unit-link pada periode 2020 tercatat naik menjadi 853 milyar konsumen, dari 505 pada 2019. - liputan6

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI menilai bahwa setidaknya terdapat empat tipe calon pemegang polis yang sesuai untuk memilih produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau *unit-linked*. Utamanya, nasabah yang menginginkan pengembangan dana optimal dinilai cocok membeli produk tersebut.

Hal tersebut tercantum dalam artikel resmi AAJI bertajuk "Mengapa Harus Memilih Asuransi Jiwa Unit-Linked" yang dikutip *Bisnis* pada Senin (12/7/2021). Artikel itu dipublikasikan di situs resmi AAJI sebagai bagian dari edukasi masyarakat terkait asuransi.

AAJI menjabarkan bahwa *unit-linked* merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan sekaligus investasi. Terdapat manfaat ganda yang akan diperoleh pemegang polis *unit-linked*, yakni proteksi asuransi dan pengembangan dana melalui investasi.

Setiap premi yang dibayarkan pemegang polis kepada perusahaan asuransi terdiri dari dua komponen, yakni untuk keperluan asuransi dan investasi. Dana investasi itu akan dikombinasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan profil risiko yang dikondisikan sang pemegang polis.

Isi Pulsa & Beli Paket Lebih Mudah Lebih Cepat di Shopee

Shopee ima

Menurut AAJI, produk *unit-linked* berbeda dengan produk asuransi tradisional yang sepenuhnya memberikan manfaat proteksi, atau tidak memiliki komponen investasi. Perbedaan itu membuat terdapat sejumlah kriteria calon nasabah yang sangat cocok untuk memilih produk *unit-linked*.

"Jika dilihat dari uraian di atas, produk asuransi jiwa *unit-linked* ini cocok untuk, pertama, calon pemegang polis yang suka berinvestasi jangka panjang," tulis AAJI seperti dikutip *Bisnis* pada Senin (12/7/2021).

Baca Juga : OJK Boorkan Lagi Poin-Poin Regulasi Unit-Linked Nihil

Kedua, AAJI menilai bahwa produk *unit-linked* cocok untuk pemegang polis yang memiliki banyak uang (*idle money*) dan mau meningkatkan kekeasyannya. Lalu, ketiga, produk itu cocok bagi pemegang polis yang suka melakukan investasi sekaligus ingin memiliki proteksi.

Asuransi Mobil Dijamin Terhemat
All Risk Mobil
Rp 3.050.000/tahun
Rp 1.982.500/tahun
CEK SEKARANG lifepal

"Keempat, *unit-linked* ini cocok untuk pemegang polis yang masih bekerja dan ingin menyiapkan tabungan untuk masa depan," tulis AAJI.

Asosiasi itu menilai bahwa *unit-linked* menjadi produk yang pertumbuhannya paling fenomenal di industri asuransi, karena manfaatnya yang relatif lebih baik dibandingkan dengan produk asuransi jiwa lainnya. Produk itu pun dinilai memiliki kemudahan dari dua komponen preminya, sehingga dua keperluan dapat terpenuhi dengan sekali bayar.

Baca Juga : Ternyata, Nasabah Kakap Juga Masih Suka 'Gagal Paham' Produk Unit-Linked

Menurut AAJI, pemegang polis dimudahkan dalam mengelola asetnya, karena investasi diatur oleh perusahaan asuransi. Produk itu pun dinilai akan membantu nasabah yang tidak memiliki banyak waktu untuk memilih produk investasi lainnya.

"Kemudahan lainnya adalah asuransi jiwa *unit-linked* menawarkan berbagai asuransi tambahan, seperti asuransi kesehatan, cacat tetap, penyakit kritis, dan lain-lain. Dengan begitu, nasabah tidak perlu direpotkan lagi mencari sendiri asuransi tambahan," tulis AAJI.

Judul	Cara Tutup Polis Asuransi: Inilah Prosedurnya dan Jangan Panik!
Nama Media	Finansialku.com
Newstrend	Edukasi Calon Nasabah Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://www.finansialku.com/cara-tutup-polis-asuransi/
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Positif

Cara Tutup Polis Asuransi: Inilah Prosedurnya dan Jangan Panik!



Punya masalah dalam berasuransi dan berniat untuk menutup polisnya?

Jangan khawatir. Anda bisa mengikuti beberapa cara tutup polis asuransi yang akan dibahas di artikel ini. Simak baik-baik ya...

Daftar Isi [Tutup]

- 1 Mengetahui Polis Asuransi
- 2 Pentingnya Memahami Polis Asuransi
- 3 Cara Tutup Polis Asuransi
 - 3.1 #1 Menutup Polis Asuransi Melalui Kantor Cabang
 - 3.2 #2 Melalui Agen Asuransi
 - 3.3 #3 Melalui Customer Service
 - 3.4 #4 Melalui Kantor Pusat
 - 3.5 #5 Berhenti Membayar
- 4 Pasti Ada Jalannya, Kok

Mengenal Polis Asuransi

Bagi nasabah asuransi pasti sudah tahu kan apa itu polis? Ya, polis adalah dokumen yang menjadi bukti keikutsertaan Anda sebagai nasabah asuransi pada suatu perusahaan asuransi.

Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau ([AAJI](#)), mengungkapkan bahwa:

"Polis asuransi adalah kontrak perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Perusahaan memiliki kewajiban mengembalikan uang jika terjadi kematian atau cacat selama masa kontrak. Pemberian uang ini diberikan kepada pemohon atau ahli waris terkait".



Sumber: Okezone.com - <https://bit.ly/3yLhivZ>

Pentingnya Memahami Polis Asuransi

Setiap nasabah asuransi wajib untuk memiliki polis asuransi. Tidak hanya itu, polis pun harus dipahami oleh Anda sebagai nasabah asuransi. Jangan sampai Anda hanya dibebani kewajiban untuk membayar tagihan asuransi tanpa dibekali dokumen atau polis ini.

Memangnya ada?

Melansir laman [asuransimurni.com](#), beberapa orang mengalami kendala dalam perjalanan berasuransi. Kebanyakan dari mereka clueless dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menutup polis asuransi.

[Baca Juga: [Perluah Menginformasikan Polis Asuransi Kepada Keluarga Terdekat?](#)]

Selidik punya selidik, ternyata *problem* utamanya yaitu mereka belum menerima dokumen polis. Padahal rekening tabungan sudah di debet otomatis untuk pembayaran asuransi tersebut.

Itu baru satu dari berbagai keluh kesah dalam berasuransi yang kerap terjadi. Perlu Anda pahami bahwa asuransi adalah bisnis jangka panjang antara Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dengan Pemegang Polis dan Tertanggung.

Pemegang polis yaitu Anda sebagai nasabah, sementara tertanggung adalah pihak yang dijamin oleh penanggung. Jadi, penting untuk memahami kontrak polis ini supaya dapat menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan informasi dari polis asuransi sejak polis asuransi terbit hingga kontrak asuransi berakhir.

Sebagai pemegang polis, Anda memiliki hak untuk melakukan perubahan dalam polis asuransi, seperti mengubah cara pembayaran, meng-*upgrade* atau *downgrade* polis, mengubah ahli waris, termasuk menutup polis itu sendiri.

Lalu, bagaimana cara menutup polis? Saya akan bahas lebih lengkap. Yuk disimak...

Cara Tutup Polis Asuransi

Sobat Finansialku, apakah Anda salah satu yang berniat menutup polis asuransi? Saya yakin, pasti ada berbagai alasan dan pertimbangan yang mendasari keputusan ini.

Sebelum masuk bahasan inti, sedikit cerita saja bahwa belum lama ini beberapa orang dalam *circle* pertemanan saya sedang mengurus proses penutupan polis asuransi mereka. Alasannya?

Kebanyakan karena efek pandemi yang terjadi saat ini. Kebetulan keluarga mereka termasuk yang merasakan dampak cukup signifikan, bukan karena terpapar virusnya tetapi harus diberhentikan dari tempat kerja secara mendadak.

Alhasil, penghasilan berkurang tapi kebutuhan harian harus tetap terpenuhi. Akhirnya mau tidak mau karena dana tunai semakin diperlukan, opsi yang diambil yaitu dengan menutup polis asuransi. Supaya tagihan berkurang dan uang yang ada di asuransi bisa membantu memenuhi kebutuhan.

Nah, ketika menutup polis asuransi maka tidak akan mendapatkan kembali premi yang pernah dibayar. Akan tetapi, hal ini berlaku lain jika nasabah tersebut membatalkan polis sesuai waktu yang sudah disepakati.

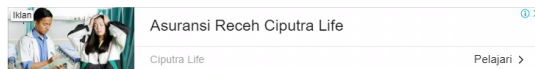
[Baca Juga: [Mengenai Asuransi Penyakit Kritis](#)]

Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk menutup polis asuransi. Berikut penjelasannya:

#1 Menutup Polis Asuransi Melalui Kantor Cabang

Cara pertama untuk tutup polis asuransi bisa melalui Kantor Cabang perusahaan asuransi tersebut. Biasanya untuk perusahaan asuransi kesehatan memiliki banyak kantor cabang di berbagai daerah.

Anda bisa memanfaatkan ini untuk berkonsultasi lebih banyak lagi jika ingin menutup polis asuransi. Bahkan Anda pun mengecek saldo asuransi yang sudah dibayarkan selama ini.



#2 Melalui Agen Asuransi

Kedua, cara tutup polis asuransi bisa Anda lakukan dengan meminta bantuan agen asuransi. Umumnya, agen memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih terhadap perusahaan asuransi yang Anda pilih.

Jangan lupa, konsultasikan dulu kendala yang Anda hadapi pada agen tersebut dan ikuti arahan mereka mengenai step by step menutup polis asuransinya.

#3 Melalui Customer Service

Selanjutnya, cara ketiga untuk tutup polis asuransi bisa menghubungi langsung customer service perusahaan asuransi untuk mendapatkan info lebih lanjut. Setelah menghubungi customer service lewat nomor teleponnya, atau email, langkah selanjutnya adalah memverifikasi data.

Nantinya Customer Service akan memastikan keanggotaan asuransi Anda. Jadi, persiapkan data-data yang nantinya akan diverifikasi melalui telepon. Data-data itu berupa:

- nomor polis
- nama lengkap
- tanggal lahir
- alamat terdaftar
- nomor handphone yang digunakan mendaftar.

Proses verifikasi itu dilakukan sekali saja. Setelah data-data nasabah diverifikasi, Anda akan mendapat nomor TIN (*Telephone Identification Number*) dari pihak customer service. Lalu, proses penutupan polis bisa diteruskan ke tahap selanjutnya.

Setelah semua data diverifikasi maka utarakan maksud penutupan polis pada customer service. Pilih metode pengiriman berkas yaitu, lewat email atau langsung ke alamat rumah. Selanjutnya, kirimkan semua persyaratan ke kantor pusat dan tunggu lah hingga mendapat pemberitahuan selanjutnya.

[Baca Juga: [Bedah Polis Asuransi Unitlink? Apa Saja yang Perlu Anda Cermati Biar Perlindungan Maksimal Premi Optimal](#)]

#4 Melalui Kantor Pusat

Cara keempat yang bisa Anda lakukan untuk menutup polis asuransi yaitu dengan mendatangi kantor pusat perusahaan asuransi. Sampaikan semua maksud dan tujuan Anda untuk tutup polis tersebut.

Kemudian serahkan semua berkas persyaratan dan tunggu semua proses dijalankan. Jika masih terdapat saldo, uang akan dikembalikan melalui transfer di nomor rekening yang dimiliki.



#5 Berhenti Membayar

Kelima, cara tutup polis asuransi bisa dilakukan dengan menghentikan pembayaran. Ada beberapa jenis atau cara setiap nasabah dalam melakukan pembayaran premi, seperti:

- Auto debet dari rekening tabungan Pemegang Polis
- Auto debet dari Kartu Kredit Pemegang Polis
- Transfer manual via rekening Virtual Account milik Penanggung

Nah, untuk menghentikan pembayaran tersebut, Anda bisa melakukan:

1. Mengosongkan saldo rekening tabungan bila pembayaran Premi dilakukan secara autodebet dari rekening tabungan.
2. Menutup Kartu Kredit atau menghabiskan limit Kartu Kredit bila pembayaran Premi dilakukan secara autodebet dari kartu kredit.
3. Tidak melakukan transfer manual ke rekening Virtual Account milik Penanggung bila pembayaran Premi dilakukan secara transfer via rekening Virtual Account.

Langkah selanjutnya untuk menutup polis adalah, dengan tidak membayar asuransi. Melalui cara ini, Anda bisa menutup polis sementara. Jika kondisi finansialmu sudah stabil, bisa melanjutkan membayarnya lagi. Untuk menutup polis ini, tidak perlu datang ke kantor pusat atau cabang.

Oh iya, untuk cara yang satu ini bisa dilakukan bagi Pemegang Polis dengan produk asuransi murni, yaitu tidak memiliki nilai investasi maupun nilai tunai yang dapat dikreditkan ke rekening Pemegang Polis.

Tapi, tidak berlaku bagi produk asuransi unit link yang memiliki nilai investasi. Sebab, jika pembayaran Premi dihentikan oleh Pemegang Polis, maka biaya asuransi akan menggerogoti nilai investasi yang ada. Hal ini akan terus dilakukan secara berulang hingga saldo nilai investasi lebih sedikit dari tagihan atau biaya asuransi.

[Baca Juga: [Ketahui Penyebab dan Konsekuensi Jika Polis Asuransi Lapse](#)]

Jadi, itulah beberapa cara tutup polis asuransi yang bisa jadi referensi. Anda tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis asuransi itu sendiri. Semoga bermanfaat.

Pasti Ada Jalannya, Kok

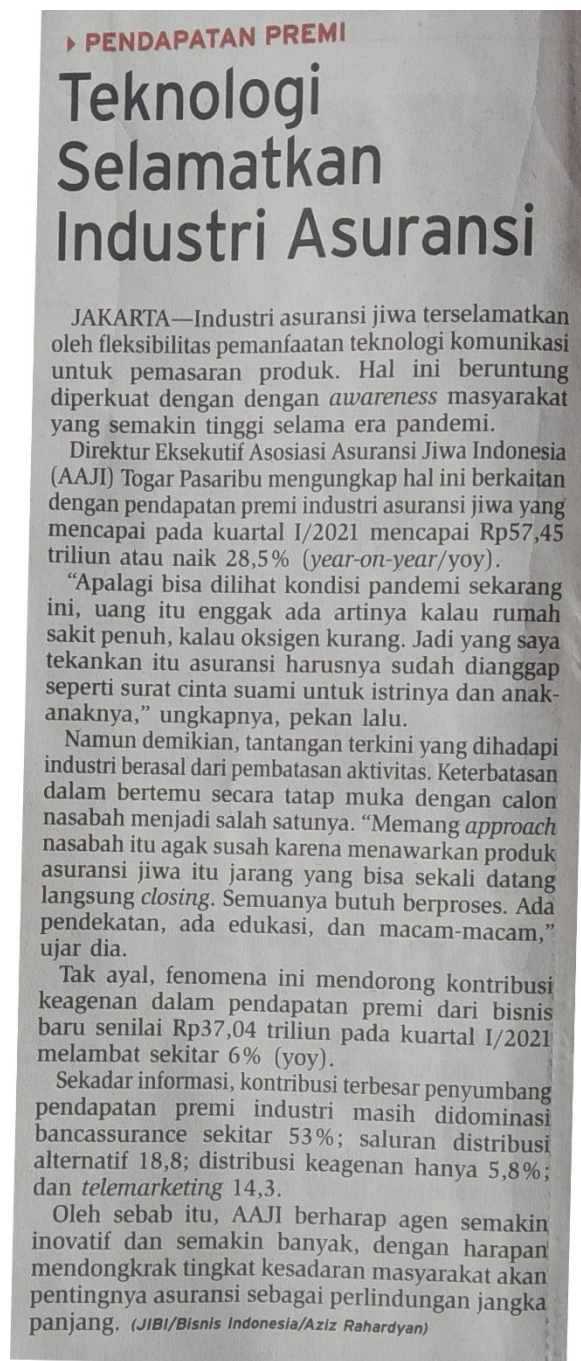
Sobat Finansialku, setelah membaca artikel ini tentunya Anda jangan panik lagi ketika akan menutup polis asuransi, karena ada beberapa cara yang bisa jadi pilihan, kan?

Namun, sebelum mengambil keputusan sebaiknya pikirkan dulu secara matang. Apalagi jika berniat menutup polis asuransi. Anda bisa mempelajari lebih banyak tentang asuransi melalui Ebook Finansialku [Studi Kasus Asuransi Kesehatan](#)

Tapi, jika menutup polis asuransi adalah keputusan yang terbaik menurut Anda, maka pilihlah cara yang paling memungkinkan Anda lakukan. Tenang, semua pasti ada jalannya, kok...

Berikut audiobook yang bisa kamu dengarkan, agar kamu paham cara memilih asuransi yang tepat.

Judul	Teknologi Selamatkan Industri Asuransi
Nama Media	Harian Jogja
Newstrend	Pendapatan Premi asuransi Melalui Saluran Keagenan
Halaman/URL	12
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Positif



Judul	BERITA FOTO - Asuransi Covid-19
Nama Media	Kontan
Newstrend	Produk Asuransi Jiwa Terkait Covid-19
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2021-07-13
Sentimen	Positif

Asuransi Covid-19



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Salah satu pemasaran asuransi Covid-19 melalui kanal digital, Senin (12/7). Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai masyarakat dapat memproteksi dirinya dengan asuransi yang memiliki manfaat terkait Covid-19. Proteksi itu dapat mengantisipasi risiko finansial jika terjangkit korona atau saat harus melakukan isolasi mandiri. #satgascovid19 #pakaimasker

Judul	Dimulai Hari Ini, Berikut Ketentuan PPKM Darurat di 16 Daerah Luar Jawa-Bali
Nama Media	Sindonews.com
Newstrend	Pemberlakuan Aturan PPKM Darurat di 16 Daerah Luar Jawa-Bali
Halaman/URL	https://nasional.sindonews.com/read/480400/15/dimulai-hari-ini-berikut-ketentuan-ppkm-darurat-di-16-daerah-luar-jawa-bali-1626059227?showpage=all
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

Dimulai Hari Ini, Berikut Ketentuan PPKM Darurat di 16 Daerah Luar Jawa-Bali

Dita Angga Rusiana
Senin, 12 Juli 2021 - 10:05 WIB



JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (**Mendagri**), **Tito Karnavian** menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021. Di dalam Inmendagri tersebut diatur bahwa terdapat 16 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali yang juga akan melaksanakan **PPKM Darurat**. PPKM Darurat ini diberlakukan mulai hari ini tanggal 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Sebagaimana yang disebutkan pada dikum kesatu huruf c angka 1 bahwa Kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Medan, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Makassar, Kabupaten Mangrove, dan Kota Sorong. **Baca juga: Anwar Abbas Minta Jokowi Pimpin Langsung PPKM Darurat**

"Pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu huruf c 1 diberlakukan PPKM Darurat," bunyi dikum kesembilan A.

Berikut Ketentuan PPKM Darurat di 16 Kabupaten/Kota tersebut:
A. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online



Baca juga:

Cek Lokasi Penyebaran PPKM Darurat, Kapolda NTB dan Danrem 162/WB Tampak Komak

Aplikasi, Aplikasi dan Sistem Serahkan Modul Penerapan BLUD Persampahan ke Kemendagri

B. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH);

C. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1. Esensial seperti:
 - a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer).
 - b. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara fisik).
 - c. Teknologi Informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, Internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat
 - d. Perhotelan non penangangan karantina
 - e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pembertahanan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf
3. Untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional
2. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa diunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat
3. Kritisal seperti:
 - a. Kesehatan
 - b. Keamanan dan ketertiban masyarakat
 - c. Penanganan bencana
 - d. Energi
 - e. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
 - f. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk tempat/tenda poliklinik
 - g. Pupuk dan petrokimia
 - h. Semen dan bahan bangunan
 - i. Obyek vital nasional
 - j. Proyek strategis nasional
 - k. Konstruksi (infrastruktur publik)
 - l. Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. Untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian
2. Untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (peratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% persen staf.
3. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelenteng dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%
4. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam

D. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).

E. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan huruf c angka 4) dan huruf d.

F. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

G. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

H. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

I. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

J. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

K. Resepsi pernikahan ditiadakan sementara

L. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
2. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Darurat serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh adalah Jabodetabek;
4. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. **Baca juga: Perangi COVID-19 di Jawa Tengah, Warga Diminta Kurangi Pergerakan Selama PPKM Darurat**

M. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

Judul	Mulai Senin Ini 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat, Berikut Aturannya
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Pemberlakuan Aturan PPKM Darurat di 16 Daerah Luar Jawa-Bali
Halaman/URL	https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/09233931/mulai-senin-ini-15-wilayah-di-luar-jawa-bali-terapkan-ppkm-darurat-berikut?page=all#page2
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

Home / News / Nasional

Mulai Senin Ini 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat, Berikut Aturannya

Kompas.com - 12/07/2021, 09:23 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komentar

0 1.000 Foto



ILLUSTRASI COVID-19 (KOMPAS.COM/NANDADUTY)

Penulis: Wahyuni Sahara | Editor: Wahyuni Sahara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperluas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Senin 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Lima belas kabupaten/kota tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Batam, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari.

Baca juga: 15 Wilayah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat Mulai 12 Juli Kemudian Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukit Tinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

"Pengaturan ini mulai berlaku 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartono.

Daapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di email kami.
Daftarkan email

Airlangga mengatakan, 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat itu ialah yang mencatatkan nilai asesmen level 4.

Artinya, di daerah tersebut terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, angka keterisian tempat tidur (*bed occupancy rate*) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Baca juga: Moeldoko Sebut PPKM Darurat Jadi Skenario Pemerintah Kurangi Mobilitas

Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di 15 wilayah ini, kata Airlangga, ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali atau sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021.

Selama kebijakan itu berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Di perkantoran, khususnya pada sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadain, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan.

Baca juga: Bantu Penerapan PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Aktifkan Relawan Lakukan Ini...

Adapun untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan maksimal 25 persen.

Terhadap sektor esensial lainnya: pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center.

Lalu internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat, dan perhotelan non-pengantaran karantina, dapat beroperasi dengan dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara itu, untuk sektor esensial berbasis industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pembentuhan Ekspor Barang (PEB) selama dua belas bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Baca juga: Aturan PPKM Darurat Kembali Direvisi, Berikut Rincian Ketentuan Terbaru

Pada sektor ini dapat beroperasi maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional hanya diperkenankan 10 persen. Kedua, sektor kritis yang meliputi kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian.

Sementara itu, terhadap sektor kritis lainnya yakni penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya.

Termasuk untuk hewan ternak/peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), serta utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat.

TERPOPULER

- 1 Kasus Dokter Lois Dilampa dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri
Dibaca 1.715.003 kali
- 2 UPDATE: Tambah 40.427 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 2.567.630
Dibaca 401.903 kali
- 3 Wapres: Susana Kita Sud Cukup Penting...
- 4 Lois Owien, Dokter yang K Berhadapan dengan Penye Hukum Setelah Tak Percu
Dibaca 291.941 kali
- 5 4 Negara Larang Masuk Penerbangan dari Indone Singapura Perketat Izin M
Dibaca 241.203 kali

sonora.id

Kunjungi kanal-kanal Sonora.id

Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25 persen staf.

Masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat ibadah lainnya tidak ditutup. Akan tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan ibadah secara berjemaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Untuk resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM Darurat. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.

Kemudian supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Baca juga: [Rumah Ibadah Tak Ditutup Saat PPKM Darurat, PGI Imbau Gereja Tetap Gelar Ibadah Virtual](#)

Apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.

Restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat.

Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

Baca juga: [Aturan PPKM Darurat Direvisi: Rumah Ibadah Tak Ditutup, Resepsi Pernikahan Ditiadakan](#)

Penutupan fasilitas umum yang meliputi area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya.

Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: [103 Kantor Non-esensial dan Non-kritikal di Jakarta Disegel karena Langgar Aturan PPKM Darurat](#)

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Masker selalu dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah. Tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa penggunaan masker.

Judul	Kota Padang PPKM Darurat, Ini Poin-poin Penting yang Wajib Dipatuhi Masyarakat
Nama Media	Sumbar.suara.com
Newstrend	Pemberlakuan Aturan PPKM Darurat di 16 Daerah Luar Jawa-Bali
Halaman/URL	https://sumbar.suara.com/read/2021/07/12/170634/kota-padang-ppkm-darurat-ini-poin-poin-penting-yang-wajib-dipatuhi-masyarakat
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

Kota Padang PPKM Darurat, Ini Poin-poin Penting yang Wajib Dipatuhi Masyarakat

Riki Chandra

Senin, 12 Juli 2021 17:06 WIB



Wali Kota Padang Hendri Septa. [suara.com/ @rahmat]

SuaraSumbang.id - Kota Padang resmi memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai Selasa (12/7/2021). Ada sejumlah poin penting yang wajib dipatuhi masyarakat selama PPKM berlangsung.

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik perguruan tinggi, akademi, sekolah, tempat pendidikan atau pelatihan dilaksanakan secara online atau daring. Kedua, pelaksanaan kegiatan pada sektor non essential diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Kemudian, sejumlah poin tentang pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial yakni keuangan, perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen pelayanan kepada masyarakat dan 25 persen untuk pelayanan perkantoran yang mendukung operasional.

Pasar modal yang berorientasi kepada pelayanan dalam menjalankan pasar modal dengan kapasitas maksimal 50 persen, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Baca Juga:

Ada Opsi PPKM Darurat Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 1,5 Bulan

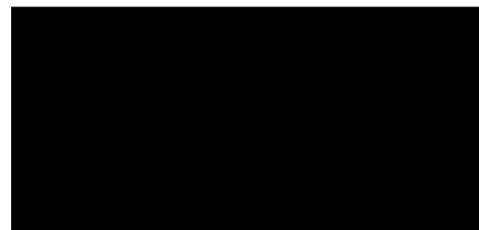
Perhotelan non penanganan karantina dengan kapasitas maksimal 50 persen staf, dan industri yang berorientasi ekspor dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi atau pabrik.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pemerintah yang melayani pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dengan kapasitas maksimal 25 persen staf Work From Office (WFO).

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan sektor kritikal, seperti kesehatan dan keamanan dan ketertiban masyarakat beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian.

Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi bahan pokok pangan, makanan, dan minuman serta penunjangnya termasuk hewan ternak, pemeliharaan, pupuk, Petrokimia, semen, dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah) beroperasi 100 persen untuk fasilitas produksi atau konstruksi atau pelayanan dan 25 persen untuk mendukung operasional administrasi perkantoran.

Lalu untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Apotik dan toko obat buka 24 jam.



Baca Juga:

Pelaksanaan ibadah Saat PPKM Darurat di Sumbar, Pemerintah ikut Maklumat MUI Sumbar

Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima (PKL) lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya melayani makanan melalui pesan antar atau take away.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik tempat konstruksi dan lokasi proyek, dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 secara lebih ketat.



Aturan PPKM Darurat Kota Padang. [Suara.com/B. Rahmat]

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah seperti masjid, musala, vihara, gereja, pura, dan lainnya, terdapat beberapa aturan pelaksanaan selama penerapan PPKM Darurat.

Mulai dari menerapkan prokes Covid-19 yang ketat yang membuat tanda pembatas jarak minimal 1 meter dan membawa perlengkapan salat bagi umat muslim. Pelaksanaan salat Idul Adha hanya diperbolehkan di masjid dan musala bagi jemaah yang berada di sekitar perumahan dengan menerapkan Prokes.

Khusus pelaksanaan ibadah kurban, panitia kurban mengantarkan daging hewan kurban kepada masyarakat yang menerima kurban ke rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan.

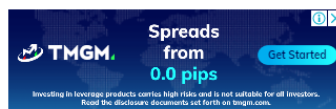
Baca Juga:

Ada Opsi PPKM Darurat Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 1,5 Bulan

Selanjutnya, pelaksana kegiatan pada area publik seperti fasilitas umum, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup sementara waktu. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara waktu.

Poin selanjutnya adalah untuk kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara waktu, dan pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, pertemuan di tempat umum, hotel yang dapat menimbulkan keramaian ditutup sementara waktu.

"Kalau sekedar pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan hanya saja jumlah kapasitas dibatasi agar tidak terjadi kerumunan, tapi kalau pesta pernikahan memang ditiadakan sementara waktu," kata Wali Kota Padang, **Hendri Septa**, Senin (12/7/2021).



Untuk penggunaan transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, ojek pangkalan dan online, dan kendaraan sewa atau rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas 70 persen dari kapasitas kendaraan dan penerapan Prokes secara lebih ketat.

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Pemkot Padang juga melakukan penyekatan di 4 titik perbatasan Kota Padang yakni Padang-Solok, Padang-Pesisir Selatan, Padang-Pariaman (Bypass), dan Padang-Pariaman (Lubukbuaya).

Jika masyarakat ingin masuk ke **Kota Padang** selama masa penyekatan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus menunjukkan kartu vaksin minimal 1 kali vaksin pertama, menunjukkan PCR H-2 atau hasil Rapid Test antigen H-1.

"Aturan tersebut dikecualikan untuk awak kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya ketika melewati posko penyekatan di perbatasan Kota Padang," tutupnya.

Judul	Wagub Nilai PPKM DARURAT Di DKI Selama Sepekan Berjalan Baik
Nama Media	Antaranews.com
Newstrend	Pemberlakuan Aturan PPKM Darurat Jawa - Bali
Halaman/URL	https://www.antaranews.com/berita/2262642/wagub-nilai-ppkm-darurat-di-dki-selama-sepekan-berjalan-baik
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

Wagub nilai PPKM Darurat di DKI selama sepekan berjalan baik

© Senin, 12 Juli 2021 17:04 WIB



Peluang memeriksa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STTR) bagi penumpang MRT Jakarta di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (12/7/2021). Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau (PPKM) Darurat, penumpang yang bekerja di sektor esensial, sektor kritis, dan pelayanan yang memiliki kebutuhan mendesak diwajibkan membawa STTR. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/awr.

“Mudah-mudahan sepuluh hari ke depan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan target”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama sepekan di Ibu Kota berjalan dengan baik.

Yang pertama, kata Riza, Senin, adalah kebijakan penutupan berlangsung baik dan dipatuhi oleh unit usaha, sekalipun masih ada perusahaan yang “nakal” diam-diam mencoba bekerja di kantor sekalipun dalam kapasitas yang kecil.

Baca juga: Wagub DKI: Jakarta tidak terapkan kebijakan vaksin berbayar

“Namun demikian kami tetap memberikan sanksi dan denda dan juga penutupan sementara, bahkan akan cabut izinya bagi yang terus membandel,” kata Riza di Balai Kota.

Selanjutnya, kata Riza, mobilitas masyarakat juga saat ini menurun jauh seiring dengan ditutupnya berbagai tempat dan diawasinya jalur keluar masuk Jakarta dengan penyekatan.

“Apa lagi kita memberlakukan surat tanda registrasi pekerja STTR, itu yang sangat efektif, apa lagi mulai diberlakukan di KRL, MRT, bahkan di Transjakarta,” ujar Riza.

Baca juga: Ini penegasan Wagub DKI terkait pelapor pelanggar PPKM Darurat

Dengan PPKM Darurat yang ditujukan untuk menurunkan kasus pandemi COVID-19, dia mengharapkan masyarakat juga untuk memberikan dukungan dengan mengikuti semua arahan dan ketentuan yang dibuat, termasuk mengikuti program vaksinasi nasional.

“Mudah-mudahan sepuluh hari ke depan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan target dan harapan yang sudah disampaikan pak Menko (Luhut B Pandjaitan) dan pak Presiden (Joko Widodo),” tuturnya.

Diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk periode 3-20 Juli 2021 dengan Jakarta termasuk di dalamnya.

Baca juga: Wagub DKI: Tes PCR di Jakarta hampir 19 kali lipat dari standar WHO

Semua unit kegiatan diminta untuk tidak melakukan kegiatan operasi, terkecuali bagi sektor esensial dan sektor kritis, itupun dengan ketentuan pembatasan yang ketat.

Untuk sektor esensial adalah meliputi:

- Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
- Pasar modal.
- Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
- Perhotelan non penanganan karantina.
- Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Untuk butir (a) sampai (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf. Sementara untuk butir (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen staf yang bekerja di fasilitas produksi/pabrik, sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen staf.

Sementara itu, untuk sektor kritis yakni:

- Kesehatan
- Kemampuan dan ketertarikan masyarakat
- Energi
- Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat
- Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
- Petrokimia
- Semen dan bahan bangunan
- Objek Vital Nasional
- Proyek Strategis Nasional
- Konstruksi
- Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah)

Untuk butir (a) dan (b) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Sedangkan butir (c) sampai (k) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sementara untuk operasi perkantoran guna mendukung operasional, maka hanya diberlakukan maksimal 25 persen staf.

Judul	PRUDENTIAL INDONESIA Luncurkan Asuransi Jiwa Syariah PRUCERAH
Nama Media	Berita Kota Makassar
Newstrend	Produk Asuransi Jiwa Syariah
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

Prudential Indonesia Luncurkan Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah

MAKASSAR, BKM -- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka, berkomitmen untuk senantiasa mendengarkan, memahami dan mewujudkan berbagai kebutuhan perlindungan keluarga Indonesia.

Kali ini, Prudential Indonesia kembali berinovasi dengan meluncurkan solusi Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah. PRUCerah merupakan asuransi jiwa tradisional berbasis Syariah pertama di industri asuransi jiwa Indonesia. Dimana menawarkan manfaat dana pendidikan bulanan dan tambahan dana pendidikan.

President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch, menjelaskan, Prudential Indonesia percaya bahwa membekali anak dengan pendidikan memadai menjadi penentu bagi lahirnya sumber daya manusia berkualitas. Dimana menyediakan akses ke pendidikan, seharusnya tidak hanya menjadi ambisi, namun juga menjadi tanggung jawab setiap orangtua.

Satu studi mengungkapkan sebanyak 74,7 persen masyarakat mengaku masih menempatkan pendidikan sebagai prioritas pengeluaran utama meski di tengah pandemi. Namun sayangnya, hanya sedikit orangtua yang memiliki perencanaan finansial. Terbukti dari survei lainnya, memperlihatkan baru 25 persen masyarakat yang mempersiapkan perlindungan untuk dana pendidikan anak.

Faktanya, kenaikan biaya pendidikan, terutama pendidikan tinggi, terus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi dari sektor pendidikan mencapai 3,81 persen pada 2019. Sedangkan rerata kenaikan uang pangkal pendidikan mencapai 10 sampai 15 persen per tahun.

"Inovasi PRUCerah yang kami luncurkan hari ini merupakan produk asuransi jiwa yang diharapkan dapat membantu memastikan bahwa perjalanan panjang orangtua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi anak-anak terus terlindungi secara optimal dari berbagai risiko. Inovasi ini juga merupakan wujud keseriusan kami dalam mendukung kemajuan sektor edukasi yang telah menjadi prioritas perusahaan sejak lama, dan bahkan menjadi salah satu pilar utama inisiatif Community



PELUNCURAN PRUCERAH -- Kiri ke kanan: President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch, Government Relation and Community Investment Director, Nini Sumohandoyo, Managing Director for Customer Solution & Delight, Himawan Purnama, Selebritas dan ibu dari dua orang anak, Donna Adi Nugroho, serta Pegiat Pendidikan dan Ketua Jaringan Semua Murid Semua Guru, Ivan Ahda pada konferensi pers peluncuran Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah dari Prudential Indonesia, secara virtual.

Investment Prudential Indonesia," sambung Jens.

Sementara itu, Managing Director for Customer Solution & Delight Prudential Indonesia, Himawan Purnama, memaparkan, strategi komprehensif yang dapat mengantisipasi risiko biaya serta proteksi dibutuhkan karena pandemi membuktikan bahwa beragam risiko kehidupan berpotensi menghambat atau menghentikan keberlangsungan pendidikan tinggi anak.

"Kami yakin PRUCerah dapat menjadi jawaban dengan manfaat perlindungannya yang beragam, mulai dari manfaat dana pendidikan hingga manfaat bebas kontribusi, termasuk yang disebabkan oleh kondisi kritis; manfaat unggulan yang tidak dimiliki produk sejenisnya," ujar Himawan.

PRUCerah ditujukan bagi orangtua berusia 19 sampai 55 tahun yang sedang mempersiapkan pendidikan anak mereka (usia 1 sampai 18 tahun) dengan pilihan masa pembayaran kontribusi yang fleksibel, yaitu selama 5 tahun atau hingga anak mencapai jenjang pendidikan tinggi. PRUCerah tidak hanya menawarkan manfaat dana pendidikan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk pendidikan tinggi, namun juga memberikan manfaat bebas kontribusi ketika orang tua meninggal dunia, menderita cacat total dan tetap atau kondisi kritis.

Pegiat Pendidikan dan Ketua Jaringan Semua Murid Semua Guru, Ivan Ahda, turut menekankan pentingnya peranan orangtua untuk menyediakan akses ke pendidikan lebih tinggi bagi anak-anak mereka. "Tidak bisa dipungkiri, persaingan

akan makin ketat dan kualifikasi pendidikan lebih tinggi akan diperlukan. Selain bekal pendidikan formal, generasi mendatang harus mampu memiliki fleksibilitas kognitif, berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, dan bekerja sama dengan orang lain, yang semuanya bisa berkembang dan terbentuk selama di pendidikan tinggi. Dengan makin kompleksnya kebutuhan di masa depan, orangtua harus mempersiapkan masa depan anak dari berbagai sisi, mulai dari pendidikan formal hingga pelatihan soft-skill," terang Ivan.

Dalam konferensi pers virtual peluncuran Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah, Solusi Perlindungan Bekal Pendidikan Demi Cerahnya Masa Depan Anak ini, Prudential Indonesia juga menghadirkan Donita, selebritas dan ibu dari dua orang anak. Donita turut berbagi kisah sebagai salah seorang sosok orangtua yang mengutamakan pendidikan.

"Saya dan suami sama-sama dibesarkan oleh figur orangtua yang memperjuangkan pendidikan. Sehingga semangat ini pula yang kami terapkan sekarang. Ketika baru menikah justru kami sudah langsung hunting sekolah untuk anak-anak serta mengalokasikan dana pendidikan yang tidak boleh diganggu gugat. Menurut saya, PRUCerah dapat membantu para orangtua untuk lebih percaya diri dalam menyusun rencana pendidikan dan masa depan anak-anak secara lebih optimal dan terproteksi. Bahkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata isteri dari aktor, model, dan pembawa acara Indonesia, Adi Nugroho.

(mir)

Judul	AXA Mandiri Memantapkan Perilaku Kerja Baru
Nama Media	Swa.co.id
Newstrend	Manajemen Internal Perusahaan Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://swa.co.id/swa/business-update/axa-mandiri-memantapkan-perilaku-kerja-baru
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

AXA Mandiri Memantapkan Perilaku Kerja Baru

by **Business Update** - July 12, 2021

Bisnis asuransi merupakan sektor usaha yang dinamis dan penuh perubahan. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua sektor usaha menuntut perusahaan asuransi untuk mengubah cara mereka beroperasi. Sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka dan pelaku *Bancassurance* terdepan di Indonesia, PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) terus bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan iklim usaha yang terus berevolusi. AXA Mandiri yang telah beroperasi selama 17 tahun di Indonesia memperkuat strateginya dengan menjalankan enam fokus utama, yaitu kapabilitas dan perilaku sumber daya manusia (SDM), optimalisasi penjualan dan transformasi distribusi, fokus pada solusi proteksi, *customer experience*, profit yang berkesinambungan, dan ekosistem digital.



STEVEN A. YUDIYANTHO, SVP Human Capital Strategy & Talent Management Bank Mandiri

Bagi AXA Mandiri, *people* merupakan salah satu aspek terpenting. Menurut Elisabeth Evaty Dewi, Chief Human Capital AXA Mandiri, strategi perusahaan diibaratkan sebagai roda yang selalu berputar, dengan bagian as (yang menjadi titik sentral bergeraknya roda) adalah *people*. "Karena itu, salah satu yang paling utama adalah melakukan pengembangan karyawan, termasuk mitra usaha, yaitu Financial Advisor sebagai tenaga pemasar (AXA Mandirian) dalam hal kapabilitas dan perilaku agar selaras dengan pencapaian strategi," kata Elisabeth.

Pada Februari 2019, AXA Mandiri merumuskan perilaku kerja, yang disebutkan sebagai konsep AMFS 2.0 Working Behaviors. Perilaku yang dituju adalah Tangguh, Cepat Tanggap, Kolaborasi, dan Rasa Memiliki. *Roadmap* peningkatan kualitas SDM melalui perilaku dan budaya ini dimulai dengan serangkaian program *alignment*, misalnya forum *focus group discussion* yang melibatkan level manajemen sampai staf. Pada tahun 2020-2021 merupakan tahap implementasi nilai-nilai dan budaya itu dalam perilaku kerja sehari-hari para AXA Mandirian.

Adapun periode 2021-2023 dirancang sebagai waktu untuk melakukan evaluasi demi memperkuat proses internalisasi nilai dan budaya yang menyeluruh bagi semua AXA Mandirian. Menurut Elisabeth, hal ini bertujuan agar semua proses pengalaman nilai dan budaya dapat membantu AXA Mandiri memenuhi visi untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa nomor satu di Indonesia.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM saja, AXA Mandiri juga memastikan perlindungan kepada karyawan (*employee protection*) dapat berjalan dengan baik demi mendukung kondisi kesehatan fisik, maupun kesehatan mental karyawan, sembari tetap mempertahankan *employee engagement* dan *productivity*. AXA Mandiri memberlakukan prosedur pengisian *self assessment* pada setiap H-1 sebelum karyawan bekerja dari kantor (WFO) dan *rapid antigen test* reguler bagi karyawan yang menghadapi risiko tinggi, karena harus memberikan pelayanan kepada nasabah, yaitu karyawan di bagian *Customer Care* dan *Sales*.

Kemudian, karyawan dipastikan memperoleh informasi secara rutin tentang protokol kesehatan melalui jalur komunikasi yang disediakan perusahaan. Selain itu, dilakukan pula survei berkala untuk mengetahui kondisi dan menjaga motivasi karyawan. Ada pula program untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan, seperti program telekonsultasi, penilaian kesadaran kesehatan mental, perpanjangan cuti, program libur satu hari (*one day off*) yang tanpa memotong cuti, serta program *flexible benefit* yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan karyawan.

Untuk menjamin karyawan dapat tetap bekerja dengan nyaman dan efektif selama bekerja dari rumah (WFH), AXA Mandiri memberlakukan *Smart Working Support* dengan menyediakan alat dan teknologi untuk semua karyawan yang memungkinkan mereka 100% bekerja dari rumah. Perusahaan pun meluncurkan *Project Productivity Monitoring* untuk memastikan karyawan tetap produktif selama WFH.

Dari sisi kepuasan karyawan, menurut Elisabeth, meskipun masih di tengah kondisi pandemi, karyawan tetap merasa *engaged* dan *happy* dengan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian skor kepuasan karyawan yang baik. AXA Mandiri bahkan tercatat sebagai salah satu entitas dengan skor tertinggi di antara entitas AXA seluruh dunia pada bidang *engagement score (e-NPS)*. Selain itu, tingkat *attrition* (undur diri) karyawan pun tergolong rendah bila dibandingkan dengan *market*.

Sementara dari aspek *Learning & Development Strategy*, AXA Mandiri membangun budaya belajar melalui program *I Learn*. Tujuan pembelajaran adalah membentuk kompetensi teknis dan kapabilitas kepemimpinan yang diperlukan perusahaan. Proses belajar bisa dilakukan melalui metode 360 derajat, yaitu bisa dari *peer learning*, *mentoring-coaching* dan *learning squad program*. "Program membangun budaya belajar dimulai dengan menumbuhkan pola pikir bahwa karyawan adalah pusat dari pembelajaran itu sendiri (*self learning*). Jadi, pembelajaran selalu dimulai dari karyawan, bukan karena adanya kewajiban, tetapi karena mereka merasa perlu untuk terus belajar meningkatkan kapabilitas dan kompetensi," tambah Elisabeth.

Dari berbagai terobosan yang telah dilakukan selama tahun 2020, hasil yang dicapai di antaranya telah terselenggara total 212 program pembelajaran dengan rata-rata *learning hours* 21,4 jam per karyawan dan *learning reach* setiap karyawan rata-rata sembilan program pembelajaran. Sebanyak 212 program tersebut terdiri dari kategori *leadership and management*, *on-boarding and culture*, *technical certification*, *technical non-certification*, *transversal skills*, dan *scholarship*. Untuk metode belajarnya, sekitar 85% menggunakan *digital learning*.

Dari sisi Reward Management, AXA Mandiri tidak hanya bisa bersaing dengan market dalam hal total kompensasi dan manfaat (*Compensation & Benefit*), tetapi juga memberikan kesempatan kepada manajer lini dan karyawan untuk terlibat dan berperan aktif dalam menentukan total kompensasi dan manfaat yang akan diperoleh atas kontribusinya kepada perusahaan. Salah satu program unggulan dari *Reward Management* yang membantu karyawan dalam masa pandemi adalah *flexible benefit*. Pada program ini, karyawan memiliki keleluasaan untuk menukarkan manfaat yang diberikan oleh perusahaan dengan hal-hal yang dibutuhkan selama masa pandemi untuk tetap sehat dan produktif (alat olahraga, vitamin, perangkat kerja). Hal ini dilakukan sebagai upaya memastikan kesehatan dan kesejahteraan mental karyawan (*Health & Mental Well Being*). Selain itu, *Reward Management* juga yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berperan aktif dalam program-program pengembangan diri (*certification program*), program komunitas, *learning*, dan *engagement events* yang atas partisipasi tersebut dapat ditukarkan dengan *point rewards*. Selain itu, salah satu program unggulan *Reward Management* yang juga memantapkan nilai perusahaan "Rasa Memiliki" adalah karyawan berkesempatan untuk menjadi bagian dari shareholder AXA Group melalui program *Shareplan*.

Sementara itu, selain menghadirkan program-program pengembangan dan peningkatan kualitas karyawan secara menyeluruh, AXA Mandiri juga memiliki program *Talent Management* yang dirancang untuk mengembangkan talenta-talenta terbaik perusahaan. Saat ini AXA Mandiri mengelompokkan talenta perusahaan ke dalam tiga kategori, yaitu *High Potential*, *Mission Critical* dan *Emerging Leaders*. "Guna terus mengasah kemampuan para talenta tersebut yang memegang peran penting dalam mendukung keenam fokus utama perusahaan, AXA Mandiri terus melakukan berbagai kegiatan untuk tetap menjaga motivasi dan *engagement* para *talent*. Di antaranya, *scholarship program*, *online certification* dan *global learning program*. Melalui berbagai program tersebut, para talenta juga memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman bekerja di dua induk usaha AXA Mandiri, yaitu di Bank Mandiri dan entitas AXA yang tersebar di seluruh dunia," tutup Elisabeth.

Di ajang *HR Excellence Award 2021* yang diselenggarakan SWA dan LM-FEB UI, AXA Mandiri mengikuti tiga kategori/segmen penilaian, yakni *Learning & Development*, *Reward Management & Talent Retention*, serta *Managing Transformation*. Pada ketiga kategori tersebut, Dewan Juri memberikan skor yang masuk dalam *rating AA*, atau *Very Good*. Dengan demikian, AXA Mandiri membuktikan bahwa untuk menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia, memperkuat pondasi melalui kualitas karyawan yang mumpuni dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku adalah hal yang utama.5

Judul	Insentif Berbuah Simalakama
Nama Media	Media Indonesia
Newstrend	Kebijakan Relaksasi di Masa Pandemi Covid-19
Halaman/URL	A2
Tanggal Berita	2021-07-12
Sentimen	Netral

Insentif Berbuah Simalakama



ASURANSI DI MASA PANDEMI: Pegus membersihkan logo asuransi jiwa di Kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta. Berdasarkan catatan AAJI, saat covid-19 mulai merebak di Tanah Air pada Maret 2020 hingga Februari 2021, pembayaran klaim atas kasus covid-19 telah mencapai Rp1,46 triliun.

M Iqbal Al Macmudi
iqbal@mediasindonesia.com

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN yang tergolong dalam industri keuangan nonbank memberi tanggapan beragam atas prospek ekonomi ke depan setelah digelutkannya berbagai paket stimulus oleh pemerintah, termasuk makin gencarnya vaksinasi saat ini. Prospek menjadi kembali tak pasti setelah kasus covid-19 justru meningkat lagi di penghujung kuartal II 2021. Padahal pertumbuhan ekonomi di empat kuartal sebelumnya mulai menuju arah pemulihan.

Terlebih setelah pemerintah kembali memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat saat ini. Hal itu menjadi barometer perekonomian tahun ini yang bakal tak jauh berbeda jika dibandingkan dengan 2020 meski sedikit lebih baik.

Bagi perusahaan pembiayaan, misalnya. Stimulus yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meredakan beban debitur justru membantah perusahaan pembiayaan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno memaparkan, berdasarkan catatannya per 28 Juni 2021, menurut hasil *monitoring* yang dilakukan terhadap 167 perusahaan pembiayaan, pengajuan permohonan restrukturisasi debitur yang terdampak covid-19 mencapai 5,7 juta kontrak, dengan total *outstanding* pokok sebesar Rp180,92 triliun dan bunga sebesar Rp45,87 triliun.

"Kontrak yang permohonan restrukturisasi ini masih dalam proses sebanyak 261,145 kontrak dengan total *outstanding* pokok sebesar Rp7,58 triliun dan bunga sebesar Rp1,83 triliun," ujarnya lebih lanjut.

Kontrak yang disetujui perusahaan pembiayaan nonbank untuk direstrukturisasi mencapai 5,1 juta kontrak dengan *outstanding* pokok sebesar Rp164,42 triliun dan bunga Rp44,76 triliun.

Banyaknya debitur yang memanfaatkan restrukturisasi ini, sambung Suwandi, menjadi beban tersendiri bagi perusahaan pembiayaan.

"Dampaknya, restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan bagi perusahaan pembiayaan. Debitur meminta restrukturisasi hingga satu tahun. Dengan waktu tersebut, kami tidak bisa membayar karyawan dan operasional perusahaan," katanya. Alhasil, tak seluruh permohonan

PER 28 Juni 2021, pengajuan permohonan restrukturisasi debitur mencapai 5,7 juta kontrak, dengan total outstanding pokok sebesar Rp180,92 triliun dan bunga sebesar Rp45,87 triliun. Perusahaan pembiayaan pun dibuat piyung.



PENJUALAN MENINGKAT: Sejumlah pengunjung mengamati mobil yang dipamerkan dalam IMS Hybrid 2021 di J Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/4). Insentif pajak penjualan atas barang mewah dianggung pemerintah (PPnBM-DTP) telah membuat angka pesanan pembelian atau *purchase order* mobil hingga pertengahan April 2021 melonjak sampai 190%.

restrukturisasi yang diajukan debitur dapat diloloskan sekaligus dengan alasan pandemi covid-19. Setidaknya ada 352.897 kontrak dengan total *outstanding* pokok sebesar Rp6,91 triliun dan bunga sebesar Rp2,28 triliun yang tak dapat direstrukturisasi. Akibatnya, permohonan itu tak sesuai dengan kriteria.

"Perlu dipahami, kemampuan pengembalian *outstanding* saat ini sudah sekitar 60%-70% sudah kembali normal. Tujuh puluh persen debitur yang sebelumnya mendapat restrukturisasi sudah mulai membayar cicilan," ungkapnya.

OJK telah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2022. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK No 18/POJK.03/2020.

Selain dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan insentif dalam bentuk diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan

No 77/PMK.010/2021. Beleid itu bertujuan memacu kembali konsumsi masyarakat sekaligus menggalakan industri otomotif yang ikut terpuruk lantaran tertekannya daya beli masyarakat. Namun, diskon PPnBM itu rupanya tak serta-merta melegakan perusahaan pembiayaan. Pasalnya, pabrik pembuat mobil belum sepenuhnya beroperasi normal.

Selain karena permintaan pasar yang juga lagi terkanal akibat berkurangnya daya beli, masih sedikitnya jumlah mobil yang diproduksi juga disebabkan hanya 50% karyawan yang diizinkan masuk kerja setiap harinya.

"Jadi, meski banyak pesanan karena adanya diskon PPnBM itu, stok kendaraan di dealer tetap masih rendah. Tentunya ini menjadi satu kendala yang mungkin (berlangsung) sampai dengan akhir tahun nanti," ucapnya.

Dari situ, Suwandi melihat prospek bisnis perusahaan pembiayaan ke de-

pan akan memiliki kendala pada pertumbuhan piutang. Dari 1 juta mobil yang terjual pada tahun lalu, tahun ini diperkirakan hanya 750 ribu.

"Jadi, kita masih akan mengalami kontraksi dan pertumbuhan masih akan minus," ucapnya.

Asuransi berikar

Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, nasib industri asuransi jiwa di masa pandemi covid-19 justru terlihat meningkat dan menjanjikan.

Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi kesehatan justru naik saat ini. Apalagi berbagai perusahaan asuransi kesehatan kini sudah memusnahkan covid-19 sebagai salah satu klausul di dalam polis.

Tak cuma itu, kepercayaan masyarakat juga dapat dijadi perusahaan asuransi. Contohnya saja pembayaran klaim.

Berdasarkan catatan AAJI, saat covid-19 mulai merebak di Tanah Air pada Maret 2020 hingga Februari 2021, pembayaran klaim atas kasus covid-19 telah mencapai Rp1,46 triliun. Sementara itu, jika ditambah dengan kasus-kasus lain, secara keseluruhan industri asuransi jiwa sudah membayar klaim sebesar Rp47,68 triliun sepanjang 2021.

Menurut Budi, hal itu menunjukkan industri asuransi jiwa merupakan industri yang likuid.

"Ini menunjukkan industri asuransi jiwa sangat likuid dan memenuhi semua kewajiban. Nilai tebus mengalami peningkatan dan manfaat meninggal dunia juga mengalami peningkatan," ujarnya.

Industri asuransi jiwa, sambungnya, turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan keuangan keluarga Indonesia melalui manfaat pertanggungan jiwa sebesar Rp12,24 triliun pada 2020 dan Rp4,45 triliun pada kuartal I 2021.

Selanjutnya, industri asuransi jiwa turut membantu program jaminan kesehatan nasional melalui manfaat pertanggungan kesehatan sebesar Rp9,88 triliun pada 2020 serta Rp2,59 triliun hingga paruh 2021.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, pendapatan industri asuransi jiwa pada kuartal I 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp66 triliun, sementara pada tahun sebelumnya minus Rp200 miliar. Total pendapatan tersebut paling banyak berasal dari pendapatan premi sebesar Rp57,73 triliun dan pendapatan investasi Rp2,44 triliun.

Sepanjang kuartal I 2021, para perusahaan asuransi jiwa menempatkan dana mereka di tiga jenis investasi, yakni reksadana yang mencapai Rp170 triliun, saham Rp145 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp65,69 triliun.

Industri asuransi jiwa turut ambil bagian dalam aktivitas bursa dan investasi jangka panjang. Diketahui, nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp4,4 triliun. Jika asuransi jiwa menjual semua saham mereka, penurunan bursa bakal signifikan," jelasnya.

Tantangan asuransi jiwa saat ini, sambung Budi, ialah masuknya industri itu ke ekosistem digital untuk kemudahan pemasaran dan layanan bagi pemegang polis.

"Kami terus menjaga optimisme karena ruang pertumbuhan tetap terbuka. Hanya saja, perlu inovasi dan kreativitas," jelasnya. (E-2)